

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mempunyai layanan kesehatan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan menjadi penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini ialah mengenai masalah sampah. Sampah menjadi suatu permasalahan yang krusial bagi kota karena berpotensi mengakibatkan menurunnya produktifitas yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan ekonomi nasional. Edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks akibat timbulan sampah diperlukan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Faktor penyebab kepedulian lingkungan didasari cara berpikir dan perilaku manusia. Partisipasi aktif warga menjadi hal yang penting untuk diidentifikasi dalam aksi pengelolaan sampah. Kota Jambi yang berpenduduk kurang lebih 713.837 orang ini

kurang lebih memiliki berbagai aktivitas. Selain aktivitas domestik rumah tangga, juga terdapat aktivitas industri besar, menengah dan kecil. Keseluruhan aktivitas Kota Jambi telah menghasilkan limbah atau sampah kurang lebih 1.600 m³/hari. Keberadaan sampah yang sedemikian besar dan tersebar di wilayah Kota Jambi dengan luas 205.38 Km² merupakan problematika tersendiri bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mengendalikan dan mengelola sampah agar tidak merugikan masyarakat. Guna menghadapi masalah seperti ini, Pemerintah Kota Jambi telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, pada pasal 22 ayat 1 menyebutkan bahwa masyarakat berkewajiban berperan serta di bidang pengelolaan sampah.¹

Dalam melaksanakan penanggulangan dampak pencemaran khususnya sampah di Kota Jambi, Pemerintahan Kota Jambi membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Jambi dalam Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga serta untuk mengimplementasikan Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Pembatasan Kantong Plastik.

Peningkatan produksi sampah telah menimbulkan masalah pada lingkungan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan. Sementara, lahan tempat

¹ M.Muhlis. *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi No.8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dalam mewujudkan lingkungan sehat dan bersih di kota jambi*. Jurnal,Legalitas, volume 8,No.2,Desember 2016.

pembuangan akhir (TPA) sampah juga makin terbatas. Kondisi ini makin memburuk manakala pengelolaan sampah di masing-masing daerah kurang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan serta tidak terkoordinasi dengan baik .

Tabel 1
Jumlah kecamatan di kota jambi dan timbulan sampah tahun 2020

No	Kecamatan	Total Volume
		Sampah (m ³ /hari)
1	Kota Baru	198.2968
2	Alam Barajo	233.1836
3	Jambi Selatan	160.5058
4	Telanaipura	248.8746
5	Jelutung	165.1936
6	Pasar Jambi	32.9758
7	Paal Merah	131.222
8	Danau Sipin	125.359
9	Danau Teluk	31.6056
10	Pelayangan	35.3704
11	Jambi Timur	175.3612
Total		1536.9484

Sumber : DLH Kota Jambi

Berdasarkan tabel di atas, tiap-tiap kecamatan Kota Jambi menghasilkan sampah sebanyak 15m³ setiap harinya, yang paling tinggi adalah Telanaipura yakni 248m³ dan yang paling rendah ada di Danau Teluk yakni 31 m³, tentu ini sangat memprihatinkan apabila tidak ditangani segera, karena sampah sudah menjadi bagian dari hidup kota untuk merawat dan mengelolanya.

Volume timbulan sampah dari pasar auduri 1 kota Jambi yang terletak di kecamatan Telanai pura sebanyak 2,97 liter/ hari. Atau, timbulan sampah kota Jambi pada September 2020 sebanyak 1.755.712,53 liter/hari setara dengan 1.755,05

m³/hari.² Selain itu, dengan berkembang pesatnya pembangunan di Kota Jambi dan bertambah banyaknya toko-toko modern serta bertambahnya jumlah penduduk di Kota Jambi setiap tahunnya dapat diartikan bahwa sampah plastik dihasilkan kedepannya akan terus menerus bertambah atau meningkat dari segi jumlah maupun efek, peningkatan ini dikhawatirkan bisa menjadi lebih buruk di kemudian hari.

Penggunaan kantong plastik dalam kehidupan modern ini terlihat sangat pesat sehingga menyebabkan tingkat ketergantungan masyarakat pada plastik semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan plastik merupakan bahan pembungkus ataupun wadah yang praktis dan kelihatan bersih, mudah didapat, tahan lama, dan harga yang terjangkau. Tetapi dibalik itu, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahaya dari kantong plastik. Kantong plastik tergolong barang sekali pakai, sehingga digunakan hanya sebatas wadah sementara yang akan menjadi sampah. Penggunaan kantong plastik yang berlebihan telah mengadi permasalahan terhadap lingkungan Kota Jambi karena sampah kantong plastik yang dihasilkan oleh seluruh pengguna kantong plastik di Kota Jambi menjadi salah satu faktor penyebab global warning, dan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan baru dapat diuraikan setelah kurun waktu yang sangat lama.

Untuk menanggulangi dampak tersebut maka, Pemerintah Kota Jambi membuat Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Pembatasan Kantong Plastik. Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Jambi Nomor 61

² BPS, 2020 Kota Jambi Dalam Angka 2020, Jambi

Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Pembatasan Kantong Plastik tersebut, Pemerintah kota jambi khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi diberi kewenangan untuk melaksanakan pemberitahuan, sosialisasi serta pengawasan dengan salah satunya memberikan informasi melalui surat edaran yang diminta kepada pelaku usaha ritel, toko modern, pasar modern untuk membatasi penggunaan kantong plastik yang meliputi;

1. Tidak menyediakan Kantong Belanja Plastik, tetapi menggantikannya dengan kantong belanja alternatif ramah lingkungan.
2. Menyarankan konsumen/pembeli untuk membawa dan menggunakan kantong belanja yang dapat digunakan kembali.
3. Memasang pengumuman di tempat masing-masing “Mohon Maaf Kami Tidak Menyediakan Kantong Plastik”.

Dalam Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 objek ditujukan kepada pelaku usaha atau ritel pada pasal 8,³ untuk wajib menggunakan kantong belanja berbahan bukan plastik atau plastik yang berbahan ramah lingkungan yang telah disebutkan jenisnya pada pasal 5. Kemudian larangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan pula ditegaskan pada pasal 9 yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang untuk menggunakan kantong belanja plastik yang tidak ramah lingkungan”⁴.

³ Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018, Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik, hlm. 5.

⁴*Ibid.*,

Aktivitas ritel tentu tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sadar atau tidak disadari bahwa setiap hari kita pasti terlibat baik secara langsung maupun tak langsung dengan aktivitas ritel. Menurut Levy dan Weirtz, dijelaskan bahwa ritel adalah suatu rangkaian aktivitas bisnis yang memberikan nilai tambah atas suatu produk atau jasa, yang dijual kepada konsumen untuk keperluan konsumsi pribadi dan keluarga.⁵ Jadi dapat disimpulkan secara sederhana bahwa definisi ritel adalah segala aktivitas penjualan produk barang dan jasa secara langsung kepada konsumen. Ritel menjadi fokus subjek dalam upaya pemerintah untuk pelestarian lingkungan dengan cara membatasi penggunaan kantong belanja plastik atau menggantinya dengan yang berbahan ramah lingkungan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan ini.

Dari hasil observasi awal yang peneliti di lapangan dari beberapa ritel yang ada di Kota Jambi, peraturan yang dibuat Walikota Jambi mengenai pembatasan kantong belanja plastik ini belum sepenuhnya diindahkan secara maksimal oleh beberapa ritel yang ada di Kota Jambi dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sejak diberlakukannya perawali ini, tak banyak pelaku usaha yang telah mencoba menerapkannya, namun kemudian kondisi ini tidak bertahan lama. Para pelaku usaha kembali menggunakan kantong belanja plastik dengan berbagai alasan.

⁵ Michael Adiwijaya, Peran Pemerintah, Industri Ritel, Dan Masyarakat Dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik Sebagai Salah Satu Upaya Pelestarian Lingkungan Journal: staf pengajar, Fakultas ekonomi Universitas Kristen Petra, hlm.3.

Tentu hal ini sangat disayangkan, padahal peraturan ini dibuat sebagai solusi dan upaya dalam pelestarian lingkungan.

Hal yang mengatur tentang sanksi sebenarnya telah termuat dalam pasal yang tertera di peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2018 tersebut. Tetapi, memang terlihat jelas pada realita bahwa sangat sulit untuk mengendalikan hal yang menjadi kebiasaan ini tanpa adanya tindakan dan regulasi dari Dinas dan lembaga terkait. Maka, regulasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi akan sangat dibutuhkan untuk pencapaian pembatasan penggunaan kantong belanja plastik. Sosialisasi menjadi langkah utama

yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi. Namun, apabila dilihat dari kacamata masyarakat sosialisasi yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi dinilai masih amat minim.

Terkait dengan ini terdapat beberapa studi yang pernah dilakukan yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Doni Alfiansyah, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahayangan Kota Bandung dengan Judul: “Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung” dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung hanya memberikan sosialisasi dengan cara memberikan informasi pengurangan penggunaan kantong plastic, sebagian besar informasi tersebut hanya didapat dari TV, dan dari internet serta dari media cetak lainnya. Selain itu belum adanya sanksi yang diberi kepada pelanggar sesuai dengan yang tertera di Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tersebut, serta pelaksanaan pengawasan dan pembinaan

yang kurang konsisten membuat implementasi kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁶

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah membahas tentang pengawasan dan pembinaan implementasi Peraturan Daerah sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Wali Kota penelitian ini dilakukan di Kota Jambi sedangkan pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya dilakukan di Kota Bandung. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang Kebijakan Pemerintah dalam pengurangan dan penggunaan kantong plastik.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Puspita, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Strategi Kampanye Pengurangan Dampak Plastik di Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2016”. Dengan menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pelaksanaan kampanye yang dilakukan BLH masih ada yang belum sesuai dengan perencanaan kampanye yang sudah ditetapkan sebelumnya. BLH tidak memiliki perencanaan waktu yang baik dalam melakukan kampanye, oleh karena itu kampanye dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan surat dari (KLHK) pusat yang masuk ke BLH. Hal tersebut terjadi karena kampanye yang dilakukan BLH di Yogyakarta sebagian besar dilakukan kepada perusahaan ritel modern, tidak menasar kepada masyarakat.⁷

⁶ Doni Alfiansyah, “Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik, 2017, hlm 60.

⁷ Yuli Puspita “Strategi Kampanye Pengurangan Dampak Plastik di Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2016”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, 2016, hlm 55.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu dilakukan di lakukan di Kota Yogyakarta sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Jambi Provinsi Jambi. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik memilih judul penelitian **“Persepsi Pengelola Ritel Modern Mengenai Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Aur Duri 1”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Pengelola Ritel Modern Mengenai Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Aur Duri 1?
2. Bagaimana Upaya Pengawasan Dan Pembinaan Dalam Mensosialisasikan Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Aur Duri 1?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan dapat menjelaskan hasil dari penelitian, Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Persepsi Pengelola Ritel Modern Mengenai Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Aur Duri 1.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Pengawasan Dan Pembinaan Dalam Mensosialisasikan Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Aur Duri 1.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan Kontribusi bagi jurusan Ilmu Pemerintahan, khususnya di Universitas Jambi dalam mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat Mengenai Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Perumnas Aur Duri Duri.

2. Manfaat Praktis

Bagi aspek praktis, dalam hal ini penelitian diharapkan akan sangat berguna bagi pemerintah Kota Jambi selaku pemberi kebijakan mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik dapat mengantisipasi dan meminimalisasi segala hal yang berkaitan dengan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2018 yang sekiranya berakibat buruk pada masyarakat dan lingkungan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Memberikan wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis khususnya, sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat, serta merupakan pemenuhan tugas akhir di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi guna meraih Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya. persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut kamus bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.⁸

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi. Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap stimuli

⁸ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : CV Cahaya Agency,2010)

dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, persepsi akan timbul.⁹

Menurut Miftah Thoha Persepsi merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami bahwa persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukanlah suatu tatanan yang benar terhadap situasi.¹⁰

Persepsi juga dapat dikatakan pandangan suatu individu yang diketahuinya serta yang dirasakannya dari individu lain. Baik dari tindakan, perkataan, dan kepribadian suatu individu tersebut. Persepsi juga berupa baik dan buruknya pandangan seseorang dalam menilai individu lain yang berinteraksi tatap muka langsung dengan individu yang dipersepsinya ataupun yang baru hanya dikenalnya selintas. Persepsi dapat melibatkan banyak orang dalam pengambilan keputusan bersama terlebih dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun bisa menyebabkan kesenjangan sosial, namun hal baiknya adalah masyarakat suatu individu-individu yang berkumpul dan hidup bersama pada lingkungan bersama dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Hal inilah yang dapat menjadi kemudahan para pihak yang

⁹ Etta Mamang Sangadji dkk, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), hal.53.

¹⁰ Sudirwo, Daeng, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, (Bandung : Penerbit Angkasa, 2012)

terkait untuk menyatukan persepsi individu-individu yang berbeda-beda dalam masyarakat menjadi 1 (satu) persepsi yaitu persepsi masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Bimo Walgito mengatakan :

“Persepsi adalah persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.”¹¹

Menurut Slameto :

“Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia yang secara terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya.”³

Sedangkan menurut Menurut Jalaludin Rakhmat :

“Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.”¹²

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi adalah tanggapan, penilaian tentang suatu benda yang diamati dengan indera-indera dan dengan tingkat pemahaman dan karakter yang dimilikinya sehingga tercipta keanekaragaman. Manusia sebagai pengamat selalu melakukan eksplorasi pada setiap objek yang ada disekitarnya. Selanjutnya makna yang berasal dari kekhasan suatu

¹¹ Bimo Walgito, “*Pengantar Psikologi Umum*”, (Yogyakarta: Andi Offset), hal. 88

¹² Jalaludin Rahmat, “*Psikologi Komunikasi*”, (Bandung: Rosdakarya, 1996), hal.51.

objek maupun lingkungan, bahkan sesuatu yang abstrak akan ditangkap oleh pancaindera manusia sebagai suatu rangsangan. Rangsangan tersebut kemudian diproses dalam benak pengamat terhadap lingkungan sekitarnya. Pandangan final itulah yang disebut sebagai persepsi. Rangsangan yang menghasilkan persepsi dapat berupa suatu objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun peristiwa, yang disadari dan dimengerti oleh pengamat. Dalam arsitektur dan urban design, terbentuknya persepsi dicapai melalui kontak fenomena visual, yang mengacu kepada konstanti, figur dan latar belakang, gerakan, dan ilusi yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk dan aktivitas yang terlihat oleh pengamat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adalah suatu proses dimana sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan pemahaman atau tanggapan terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi. Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan mengapa dua orang yang melihat sesuatu mungkin memberi interpretasi yang berbeda tentang yang dilihatnya itu.

Secara umum Sondang P. Siagian membagi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menjadi tiga, yaitu:

1. Faktor dari diri orang yang bersangkutan sendiri, yaitu faktor yang timbul apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya, hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik individual seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya.
2. Faktor dari sasaran persepsi, yaitu faktor yang timbul dari apa yang akan dipersepsi, sasaran itu bisa berupa orang, benda atau peristiwa yang sifat-

sifat dari sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Seperti gerakan, suara, ukuran, tindak-tanduk dan ciri-ciri lain dari sasaran persepsi.

3. Faktor dari situasi, yaitu faktor yang muncul sehubungan karena situasi pada waktu mempersepsi. Pada bagian ini persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi, yang mana persepsi itu timbul dan perlu mendapat perhatian karena situasi merupakan factor yang ikut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.¹³

1.5.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam Praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Van Meter dan Van Horn mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diatahakan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”¹⁴ Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni : *top down* dan *botton up*.¹⁵

Dalam Bahasa Lester dan Stewart istilah itu dinamakan dengan the command and control approach (pendekatan control dan komando, yang mirip dengan top down approach) dan the market approach (pendekatan pasar, yang mirip dengan botton up approach) masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam bentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasil.

¹³ Siagian Sondang, “*Teori Motivasi dan Aplikasinya*”, (Jakarta, Rineka Cipta, 2016), hal. 101-

¹⁴ *Ibid*, hlm 138

¹⁵ *Ibid*, hlm 139

Pendekatan *top down*, misalnya, dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.¹⁶

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusan pun diambil dari tingkat pusat. “Pendekatan *top down* bertitik-tolak dari presfektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya.”¹⁷

Salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi. Implementasi kebijakan adalah tahap lanjutan setelah kebijakan Perumusan Masalah, Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan Rekomendasi, Adopsi Kebijakan Pemantauan, Implementasi Kebijakan Penilaian.

Widodo menjelaskan Implementasi berarti “Menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu”. Implementasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aktor serta menggunakan berbagai sumber daya dalam pelaksanaannya dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, selain itu implementasi merupakan tahapan yang krusial dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kebijakan. Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan jika tidak diimplementasikan tidak akan menimbulkan dampak atau tujuan yang diinginkan.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm 140

¹⁷ *Ibid*, hlm 141

¹⁸ George C dalam Keban, Yermias T., *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)*, Yogyakarta: Gava Media, 2008 hlm 66-67

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan.¹⁹

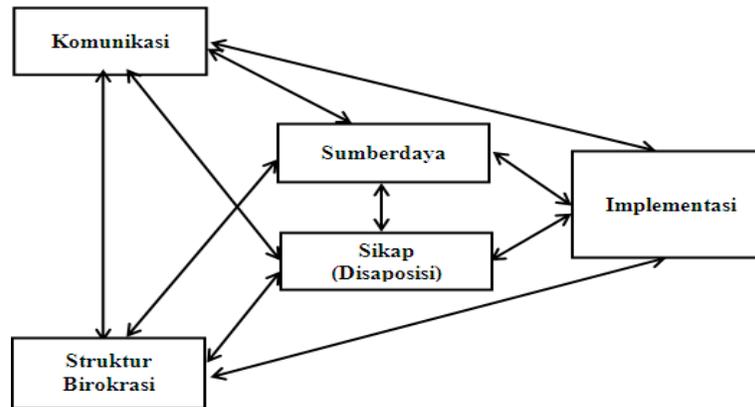
Teori George C. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm 65

²⁰ *Ibid*, hlm 67

Gambar 1.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III



Sumber George C. Edward III (Keban Yeremias 2008)

Menurut Edward memahami suatu implementasi kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk menyederhanakan perlu merinci penjelasan-penjelasan tentang implementasi dalam komponen-komponen utama. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dari banyak variabel, oleh karena itu tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi , sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya, dan bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi implementasi kebijakan.²¹

Menurut Grindle dalam Keban Yeremias menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu:

1. Isi Kebijakan (content of policy)

Variabel isi kebijakan mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan, Jenis manfaat yang diterima oleh target group, Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan, Apakah letak dari sebuah program sudah tepat, Apakah sebuah

²¹ *Ibid*, hlm 67

kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci dan Apakah sebuah program di dukung oleh sumber daya manusia.

2. Lingkungan Implementasi (conteks of policy)

Variabel lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa dan Tingkat kepatuhan dan responsivitas sasaran.²²

Dalam implementasinya sendiri tidak terlepas dari berbagai kendala yang timbul akibat proses yang rumit dan kompleks, kendala tersebut menjadi penghambat dalam keberhasilan suatu implementasi bahkan dapat menyebabkan gagalnya implementasi tersebut. Karakteristik masalah merupakan salah satu dari tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi seperti yang dikemukakan oleh Mazamanian dan Sabatier dalam *Keban Yeremias* yang mengidentifikasi Karakteristik masalah yang terdiri atas :

1. Kesulitan Teknis.

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, sifat dari suatu masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.

2. Keragaman perilaku kelompok sasaran.

Hal ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit.

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.

Sebuah program relatif akan sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Sebuah program bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.²³

²² *Ibid.*, hlm 63

²³ *Ibid.*, hlm 68

Dari penjabaran di atas ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu aturan yang didasarkan pada pada landasan dan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa guna kemaslahatan masyarakat khususnya kota Jambi, yakni dengan membentuk Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Dan Penggunaan Kantong Belanja Plastik yang memiliki tujuan demi ketertiban dan pentingnya menggunakan kantong belanja dengan bijak.

1.5.3 Sampah

Permasalahan lingkungan saat ini ada diberbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya, banyak sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.

Menurut Tchobanoglous Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Menurut kamus lingkungan hidup, sampah mempunyai defenisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, bahan yang rusak dalam pembikinannya, materi yang berkelebihan, atau bahan yang ditolak.²⁴

Berdasarkan SK SNI Tahun 1990, sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi

²⁴ Seputar ilmu, 22 *Pengertian Sampah Menurut Para Ahli Terlengkap*. Di akses Senin 22 juni 2020 Pukul 15.16 WIB <https://seputarilmu.com/2019/11/sampah-menurut-para-ahli.html>

pembangunan.²⁵ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.²⁶ Jadi kesimpulannya sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses.

a. Jenis-jenis Sampah

Menurut Donna Asteria jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain :

1. Berdasarkan Sumbernya

a. Sampah alam

Yaitu sampah yang ada oleh proses alam yang dapat di daur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai menjaditanah . Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman .

b. Sampah Manusia

Sampah manusia (human waste) adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan dalam mengurangi penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. Termasuk didalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa (plumbing).

c. Sampah Konsumsi

Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia (pengguna barang), dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi sehari-hari. Ini adalah sampah yang umum, namun meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri.

²⁵ Sri Subekti, *pengelolaan sampah Rumah Tangga 3R Berbasis masyarakat pendahuluan*, diakses Rabu 06 mei 2020 Pukul 14.30 WIB <http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektihad>

²⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ayat 1

d. Sampah Industri

Sampah industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses industri. Sampah yang dikeluarkan dari sebuah industri dengan jumlah yang besar dapat dikatakan sebagai limbah. Berikut adalah gambaran dari limbah yang berasal dari beberapa industri, yaitu :

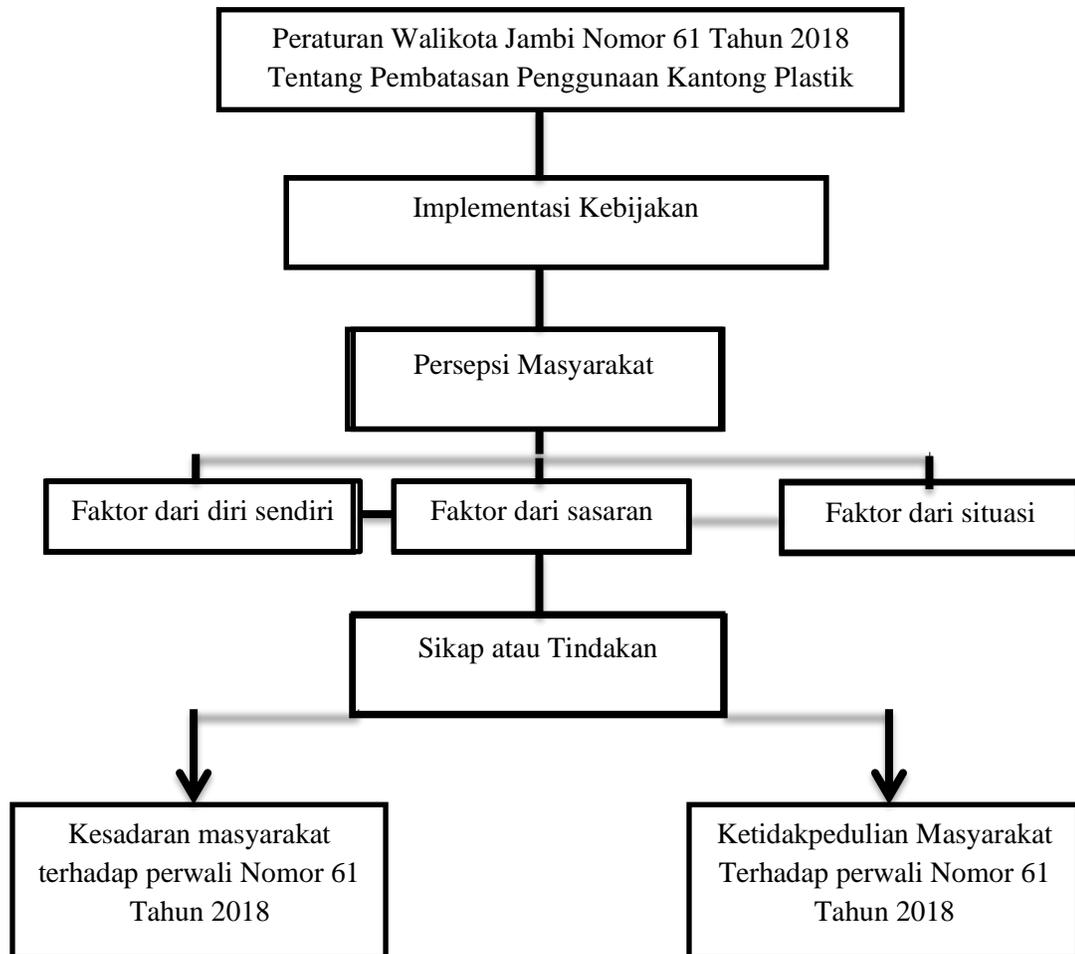
- 1) Limbah industri pangan (makanan), sebagai contoh yaitu hasil ampas makanan sisa produksi yang dibuang dapat menimbulkan bau dan polusi jika pembuangannya tidak diberi perlakuan yang tepat.
 - 2) Limbah Industri kimia dan bahan bangunan, sebagai contoh industri pembuat minyak pelumas (OLI) dalam proses pembuatannya membutuhkan 8 air skala besar, mengakibatkan pula besarnya limbah cair yang dikeluarkan ke lingkungan sekitarnya. air hasil produksi ini mengandung zat kimia yang tidak baik bagi tubuh yang dapat berbahaya bagi kesehatan.
 - 3) Limbah industri logam dan elektronika, bahan buangan seperti serbuk besi, debu dan asap dapat mencemari udara sekitar jika tidak ditangani dengan cara yang tepat.
2. Berdasarkan sifatnya
 - a. Sampah organik Sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.
 - b. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas.
 3. Berdasarkan Bentuknya
 - a. Sampah padat Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik.
 - b. Sampah cair Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.²⁷

²⁷ Donna Asteria dan Heruman, *Bank sampah sebagai alternative strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya*. Jurnal manusia dan lingkungan, volume 23, No. 1 Maret, 2016

Jenis Sampah yang termasuk di dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Jambi yaitu Sampah Anorganik. Pembatasan sampah plastik ini penting dilakukan dalam rangka mereduksi sampah plastik, serta menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan akibat dampak pencemaran sampah plastik. Pelaksanaan pengurangan penggunaan sampah plastik oleh pemerintah Kota Jambi itu merupakan amanat dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

1.6 Kerangka Berikir

Kerangka pemikiran menyangkut konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teoritis dan dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Skema tersebut menjelaskan dasar pemikiran, mekanisme, dan faktor-faktor yang timbul secara singkat. Dengan demikian gambaran jalannya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah. Secara singkat kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1.2 Kerangka Pikir

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pendekatan deskriptif peneliti menggambarkan suatu kondisi apa adanya yang didapat dari hasil penelitian di lapangan.

2.1. Jenis penelitian

Pada bagian ini peneliti menjelaskan bahwa jenis penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif menggambarkan, mengungkapkan, menceritakan, dan meringkas, berbagai kondisi dan situasi yang ada. Lexy J. Meleong mendefinisikan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁸ Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *grounded theory*, yaitu penelitian penjelasan umum (teori) tentang proses, aksi, atau interaksi yang dibentuk oleh pandangan partisipan. Pandangan *grounded theory* harus berdasarkan pada data lapangan. Maka dari itu *grounded theory* hadir untuk memunculkan teori tentang aksi, interaksi atau proses dengan saling menghubungkan kategori informasi berdasarkan pada data dari informan.²⁹

Selain itu, “penelitian menggunakan metode studi kasus, yaitu fenomena khusus yang dihadirkan dalam suatu konteks yang terbatas (*bounded text*), meski batasan-batasan fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas.”³⁰ Peneliti ingin mengungkapkan secara mendalam mengenai Persepsi Pengelola Ritel Modern Mengenai Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Aur Duri 1.

²⁸ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 4.

²⁹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desai Riset*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2014) hlm 115-116.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm 12

2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan :

- a) Dinas Lingkungan Hidup, yang beralamat di Jalan Haji Zainir Haviz, Paal Lima, Kota Baru, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi 36129.
- b) Pasar Tradisional Perumnas Auduri 1 Kota Jambi
- c) Pelaku usaha Pasar Auduri 1 Indomart, Alfarmart, Minimarket, Di Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.

Alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan peneliti ingin melihat Persepsi Pengelola Ritel Modern Mengenai Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Aur Duri 1. Hal yang mengatur tentang sanksi sebenarnya telah termuat dalam pasal yang tertera di peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2018 tersebut. Terlihat jelas pada realita bahwa sangat sulit untuk mengendalikan hal yang menjadi kebiasaan ini tanpa adanya tindakan dan regulasi dari Dinas dan lembaga terkait. Maka, regulasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi akan sangat dibutuhkan untuk pencapaian pembatasan penggunaan kantong belanja plastik. Sosialisasi menjadi langkah utama yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi. Namun, apabila dilihat dari kacamata masyarakat sosialisasi yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi dinilai masih amat minim.

2.3. Fokus Penelitian

Untuk membatasi studi dalam penelitian digunakan batasan masalah yang disebut dengan fokus penelitian, fokus penelitian mengungkapkan data yang akan dikumpulkan dan dalam pelaksanaannya bisa menambah dan menggeser penelitian.

Fokus penelitian secara tersurat berisi mengenai definisi operasional yang digunakan dalam penelitian, dimana terdapat indikator-indikator (dimensi) penelitian. Secara langsung indikator-indikator (dimensi) ini akan mampu menyaring berbagai informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat.³¹

Untuk memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan Persepsi Pengelola Ritel Modern Mengenai Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Aur Duri 1. Sedangkan tempat penelitian, peneliti mengambil sampel pada Pasar Tradisional Perumnas Auduri dan ritel modern yang ada dikawasan Kecamatan Telanaipura dengan jumlah sebanyak 5 gerai modern yakni 1 Indomart, 3 Alfamart, TOP Central MiniMarket, dan Desy market, serta penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada tahun 2020.

2.4. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data yang dipilih secara purposive dan bersifat *snowball sampling*. Penentuan sampel sumber data pada proposal masih bersifat sementara, dan akan berkembang kemudian setelah peneliti ke lapangan.³² Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan teknik pengumpulan data. Contohnya seperti data hasil

³¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 31.

³² Muhammad Idrus, *Op.cit* hlm.382

kuisisioner terhadap responden, data hasil wawancara langsung, data hasil survey.³³

- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui media yang sifatnya melengkapi data primer seperti literatur, jurnal ilmiah dan koran yang erat kaitannya dengan penelitian ini.³⁴

2.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentu Informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara *purposive sampling* dimana orang-orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian merupakan orang-orang yang bertanggung jawab dan tahu akan masalah yang diteliti. Sesuai dengan namanya *purposive sampling* diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa subjek penelitian yang akan dilakukan itu.³⁵

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi selengkap-lengkapannya dan relevan. Informan penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
2. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
3. Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
4. Kasi Penataan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

³³ Salamadian, *Pengertian Data, Fungsi Sumber data, Jenis data dan contohnya*. Diakses Selasa 30 juni 2020 pukul 18.30 WIB <https://salamadian.com/pengertian-data/>

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid*

5. Pelaku Usaha atau Ritel modern yang ada di Pasar Tradisional Perumnas Auduri dan Kecamatan Telanaipura
6. Masyarakat yang berbelanja.

2.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan bahan pembahasan dan analisis, didalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut³⁶:

a) Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung, dengan menggunakan alat indera pendengaran, dan penglihatan terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala yang terjadi.³⁷

Pengamatan dalam penelitian ini adalah instrumen untuk mendapatkan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi deskriptif dan observasi non partisipasi.

Observasi yang diamati oleh pelaku dalam penelitian ini adalah Persepsi Pengelola Ritel Modern Mengenai Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Aur Duri 1. Pada saat observasi awal ditemukan keganjalan dan ketidakpatuhan pelaku usaha atau ritel yang ada di Kecamatan Telanaipura Kelurahan Kota Jambi. Sebagian dari mereka masih menggunakan kantong belanja plastik yang tidak

³⁶*Ibid*, hlm 80-93

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014). hlm 175

ramah lingkungan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan peraturan Wali Kota Jambi Nomor 61 tahun 2018 pada pasal 9. Selain itu observasi awal yang dilihat bahwa DLH kota Jambi kurang dalam mensosialisasikan peraturan ini. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.³⁸ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang mana telah ditetapkan terlebih dulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto-foto, rekaman kaset yang berkaitan dengan penelitian dan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian.³⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penggumpalan data dokumentasi dengan meneliti catatan-catatan tertulis, dokumen dan buku yang

³⁸ Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian", (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008). hlm 190

³⁹ Sugiyono, *Op., Cit* hlm 137.

berkaitan dengan peraturan walikota Jambi Nomor 61 tahun 2018. Untuk mendapatkan data yang akurat maka penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang berada di kota Jambi seperti DLH dan lembaga terkait, pelaku usaha atau ritel modern yang ada Kecamatan Telanaipura Kelurahan Kota Jambi.

2.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, memilih yang penting dan essential sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan⁴⁰.

Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu model analisis interaktif Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: ⁴¹

a) Reduksi Data

Dapat diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

⁴⁰V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014). hlm.149.

⁴¹*Ibid*, hlm.244.

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data yang diambil dari hasil data yang diambil berkaitan tentang pembatasan penggunaan kantong belanja plastik di Kota Jambi.

b) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *display data* atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miled dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan dalam skripsi ini merupakan data yang bersangkutan dengan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik Kota Jambi.

1.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi merupakan suatu cara mendapatkan data yang benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁴² Triangulasi data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan realibitas data yang diperoleh dalam penelitian.

Teknik triangulasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Triangulasi Data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian. Membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan dokumen yang ada. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan menggunakan analisis data dan mencoba untuk mentriangulasikan, membandingkan pengamatan terhadap masyarakat dengan adanya Persepsi Pengelola Ritel Modern Mengenai Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Aur Duri 1 dengan hasil wawancara yang dilakukan.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran secara lebih jelas atas keseluruhan isi dan pembasahan skripsi ini secara sistematis guna memudahkan dalam hal menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematis penulisan skripsi yang dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yaitu: